BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1.1 Sejarah Singkat PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta

Masa Penjajahan Belanda

Sejak masa penjajahan Belanda sampai dengan permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik baik milik pemerintah maupun swasta.

Di Jawa Barat khususnya kota Bandung perusahaan yang mengelola tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM) yang berdiri pada tahun 1905.

Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan Gameenschapplijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaries Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945 pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja keseluruhan pulau Jawa setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahan pengolahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1957 merupakan titik tolak dari pengolahan dan penguasan kelistrikan

diseluruh Indonesia yang dikuasai oleh RI. Karena pada tanggal tersebut dimulai adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 86 tahun 1958 dan peraturan pemerintah NO. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang ada pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No. 67. Tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandoeng pun diganti nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tanggerang.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggambungkan diri pada kantor-kantor jawatan listrik dan gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi kobarsjih tentang nasionalisme perusahaan listrik dan gas swasta kepada parlemen RI, selanjutnya dikeluarkan keputusan Presiden RI No. 163 tanggal 3 Oktober tahun 1953 tentang nasionalisme perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika akte konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang-undang No. 18 tahun 1958 tertanggal 27 Desember tentang Nasionalisasi

semua perusahaan Belanda dan Peraturan pemerintah No. 18 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan gas milik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia.

Setelah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari listrik tesebut telah diperingati untuk pertamakalinya pada tanggl 27 Oktober tahun 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional di Indonesia Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penempatan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas yang digabung dengan hari Kebangkitan Pekerjaan Umum Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat nilai-nilai Hari Listrik, maka berdasarkan keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkanlah tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Tanggal 8 September 1975 tentang struktur organisasi dan kerjasama perusahaan Listrik Negara. Maka PLN mengadakan negoisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dan Banten. Dengan Adanya peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 1994, tanggal 16 Juli 1999 tentang pengalihan bentuk perusahaan perseroan dengan sebutan PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan adanya peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juli 1999 tentang

pengalihan bentuk perseroan dengan sebutan PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sejak tanggal 30 Juli 1999 sesuai akte kelahiran.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten didirikan bermula atas undang-undang RI No. 17 tahun 1990 yang bertugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dengan memindahkan prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara dengan kata lain bahwa PLN dalam operasinya yaitu menjual listrik dibawah pengawasan Departemen Pertambangan dan Energi dengan misi ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam mencari keuntungan.

Kantor PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten terdiri dari:

1. Kantor Distribusi
2. Kantor APJ Bogor
3. Kantor APJ Cirebon
4. Kantor APJ Cimahi
5. Kantor APJ Purwakarta
6. Kantor APJ Sukabumi
7. Kantor APJ Majalaya
8. Kantor APJ Garut
9. Kantor APJ Cianjur
10. Kantor APJ Bekasi
11. Kantor APJ Depok
12. Kantor APJ Tasik Malaya
13. Kantor APJ Banten
14. Kantor APJ Sumedang
15. Kantor APJ Karawang
16. Kantor APJ Bandung
17. Kantor APD Bandung

3.1.2 Tinjauan Umum Tentang PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta

Pembangunan energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya.

Pembangunan energi harus memperhatikan sumber energi untuk jangka waktu panjang. Kebutuhan energi dalam negeri, peluang ekspor, keamanan, dan keselamatan kemasyarakatan, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan energi dilaksanakan melalui survey, eskploitasi dan pemanfaatan sumber energi baru, peningkatan dan kreativitas penambangan dan sumber energi. Upaya untuk menjaga kelestarian sumber energi diantaranya yaitu dengan cara penghematan, penganekaragaman dan penggunaan sumber energi secara optimal dan penggunaan peralatan dan teknologi hemat dalam rangka kebijaksanaan energi nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik terus meningkat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejehteraan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Pembangunan sarana dan pengembangan tenaga ilstrik dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi, pengolahan ketenagalistrikan dilaksanakan secara efisien serta dapat menjamin dan bermutu dengan tingkat harga yang wajar untuk kelangsungan pengembangan usaha dan penyaluran tenaga listrik.

Dalam menetapkan tenaga umum ketenagalistrikan nasional perlu diupayakan pemanfaatan secara optimal segenap potensi sumber daya energi.

3.1.3 Visi, Misi dan Moto PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta

Visi dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta yaitu: Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan berhimpun kepada profesi insani.

Misi dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta yaitu:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang berkait, berorientasi anggota pemegang saham.
2. Menjalankan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Moto Dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta yaitu: Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik (*Electric For Better Life*)

3.1.4 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Oleh PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta

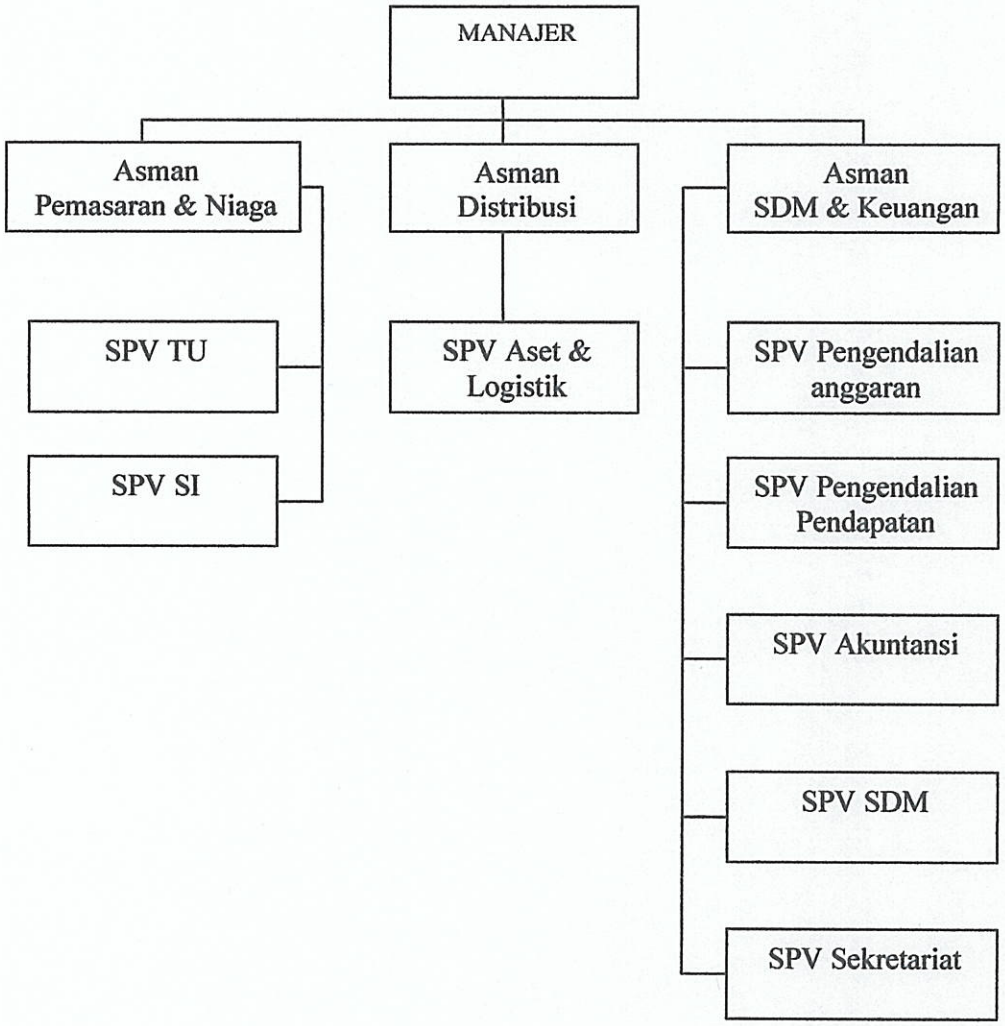
Sebagai perusahaan yang besar PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup.

Untuk Kelancaran dalam pekerjaan, baik itu pengolahan data-data maupun pelayanan terhadap konsumennya, telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana

penunjang PC (*Personal Computer*), yang dapat mempercepat dalam proses pekerjaan, sehingga dapat efisien dalam segala hal.

Selain PC sarana penunjang lainnya yaitu kendaraan dinas yang sangat penting artinya, baik sebagai transportasi antar unit di dalam wilayah PT. PLN (Persero) Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta dilengkapi dengan pesawat telepon. Sebagai kepedulian dalam pelayanan juga disediakan nomor khusus pelayanan pelanggan gangguan yaitu 123 dan untuk billing info PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta.

3.1.5 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta



3.2 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta pada Bagian Pelayanan dan Pelanggan mengenai pelayanan para pelanggan baik yang akan melakukan pasang baru, rubah daya ataupun pengaduan teknis lainnya, namun dalam penulisan laporan ini penulis lebih menitikberatkan pada pelayanan pelanggan yang akan melakukan rubah daya.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta adalah suatu perusahaan yang bertugas untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi.

Kegiatan pada bagian Pelayanan dan Pelanggan banyak sekali, terutama yang menyangkut pelayanan pelanggan yang akan melakukan pasang baru dan rubah daya.

3.3. Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek.

Pada saat melaksanakan kuliah kerja praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta, penulis ditempatkan pada Bagian Pelayanan dan Pelanggan, salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh penulis adalah turut serta membantu pegawai dalam melayani pelanggan ataupun calon pelanggan yang akan melakukan pasang baru, rubah daya, dan pengaduan teknis lainnya serta memasukan data yang berhubungan dengan pelanggan yang akan melakukan rubah daya, pasang kembali, ataupun pengaduan teknis lainnya dan calon pelanggan yang akan meminta penyambungan baru.

3.4 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Setelah penulis melakukan kuliah kerja praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta, penulis menjadi tahu akan prosedur dan aliran data pada saat pelanggan akan melakukan rubah daya. Pada kesempatan ini penulis akan mencoba menjabarkan prosedur rubah daya di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta.

Prosedur Rubah Daya:

1. Pertama-tama pelanggan menyerahkan foto copy KTP, rekening terakhir, dan surat pernyataan rubah daya kepada bagian pelayanan dan pelanggan.
2. Berdasarkan data-data yang diberikan, maka pelanggan dibuatkan kupon pembayaran dan harus membayarnya di bagian kasir.
3. Setelah dibayar, pelanggan lalu dibuatkan kuitansi pembayaran.
4. Untuk selanjutnya data-data pelanggan tadi diolah oleh bagian pelayanan dan pelanggan hingga menghasilkan perintah kerja.
5. Untuk merealisasikan permintaan pelanggan yang bersangkutan, maka perintah kerja tersebut diserahkan kebagian penyambungan.
6. Tahap terakhir dari prosedur rubah daya yaitu dilakukan peremajaan data pelanggan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM